

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

RENCANA AKSI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2016-2019

RENCANA AKSI

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019

Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak pelaku yang terlibat dalam implementasi program kelautan dan kemaritiman. Pengembangan program kelautan dan kemaritiman perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pembangunan Poros Maritim meliputi: (1) Membangun budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Untuk itu Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

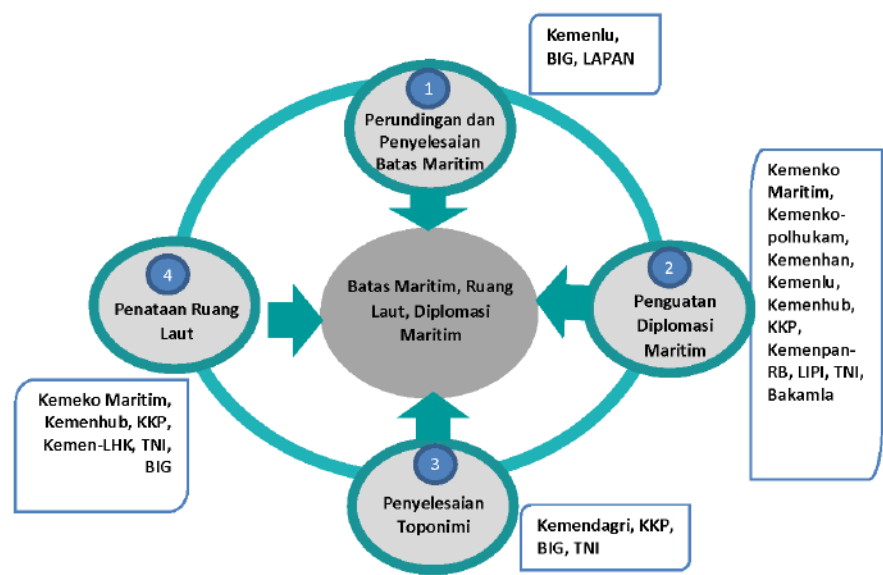
Secara skematik, 5 (lima) klaster program prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT,
DAN DIPLOMASI MARITIM

PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM

Program prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Secara skematik, 4 (empat) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim

Penentuan batas maritim merupakan bagian penting dalam kaitan penegakan kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penetapan batas maritim ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum guna mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*offshore*), transportasi laut dan lainnya. Batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga mencakup batas laut wilayah (*Territorial Sea*), batas

perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas Landas Kontinen. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dapat membuat daerah perbatasan laut menjadi rawan konflik. Saat ini penetapan batas maritim yang telah selesai dilakukan adalah batas maritim dengan Papua Nugini.

2. Penguatan Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim memiliki peran penting dalam hubungan antarbangsa, termasuk dalam pengelolaan laut dan samudera yang saling berkaitan, kedaulatan dan kemandirian pangan, perebutan pengaruh dengan menggunakan matra laut, perbedaan kepentingan antarnegara di laut serta alokasi kedaulatan dan yurisdiksi di laut. Dengan luas laut 5,8 juta km² dan kekayaan yang berlimpah, Indonesia dapat menjalankan peran kepemimpinan dalam menata kerja sama ekonomi yang memperhatikan kelestarian laut, dan perdagangan global melalui laut.

Berdasarkan letak geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dalam melaksanakan politik luar negeri aktif di tengah percaturan regional dan global. *Smart power diplomacy* merupakan pendekatan yang tepat dan perlu dikembangkan dalam kerangka kerja sama maritim di kawasan. Antisipasi terhadap perkembangan situasi kemaritiman di kawasan perlu dilakukan, seperti konflik pemanfaatan sumber daya laut dan klaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan oleh beberapa negara, yang akan mempengaruhi keamanan kawasan dan dapat berdampak terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna dan sekitarnya. Unsur penting saat melakukan diplomasi maritim untuk mengatasi masalah perbatasan maritim adalah dengan memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional, serta mempertimbangkan *national interest* sebagai tujuan utamanya. Belum terbentuknya pemahaman yang sama antara Negara Pihak terhadap implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memuat hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan, menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mengelola hubungan antarnegara di laut. Isu tentang kelautan dan kemaritiman telah menjadi pembahasan dalam berbagai forum kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai arsitektur

regional di kawasan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Asean Maritime Forum*, dan *East Asia Summit Maritime Cooperation* perlu ditingkatkan.

3. Penyelesaian Toponimi

Penyelesaian toponimi pulau merupakan kebutuhan nasional Indonesia untuk mengetahui secara pasti jumlah, lokasi dan nama seluruh pulau yang berada dalam kedaulatan Indonesia. Proses toponimi mencakup penamaan dan penentuan posisi geografis di muka bumi, yang kemudian disusun dalam suatu daftar inventaris kondisi geografi wilayah kedaulatan negara. Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.466 pulau telah selesai toponiminya, sisanya sebanyak 4.038 pulau masih memerlukan proses verifikasi dan validasi. Hasil proses tersebut selanjutnya akan didepositkan pada sidang PBB tentang Standardisasi Nama Geografis (*United Nations Conference on Standardization of Geographical Names/UNCSGN*).

4. Penataan Ruang Laut

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan disusunnya penataan ruang kelautan nasional, diantaranya: (1) mempersiapkan dukungan bagi pengembangan kegiatan sumber daya alam pesisir dan laut, serta fungsi perlindungan lingkungan; (2) mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional; (3) membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antarbagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat marjinal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) memperkuat akses antarbagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan, serta memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain; serta (5) mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut.

Penataan Ruang Laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan penyusunan perencanaan tata ruang laut nasional, sementara untuk pesisir diatur

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi perluasan kewenangan provinsi, dari semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan pengelolaan atas wilayah 0-4 mil di laut kini tidak lagi memiliki kewenangan. Terkait pengelolaan ruang laut, diperlukan segera penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Laut Nasional sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta penyelesaian data/peta dasar dan tematik untuk mendukung penyelesaian RZWP-3-K.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim, dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019											
PROGRAM PRIORITAS A. BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM											
Sasaran Utama:											
1. Tereleaksainkannya pembakuan nama pulau											
2. Peningkatan peran dan partisipasi aktif Indonesia											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
A.1 PERUNDINGAN DAN PENYELESAIAN BATAS MARITIM											
1.	Percepatan Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Penetapan Undang-Undang (UU) Ratifikasi Perjanjian Perbatasan Maritim Republik Indonesia (RI)	RI dan Singapura (segmen timur laut teritorial)	v	v	-	-	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										Republik Indonesia (Polri), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	
				RI dan Filipina (Zona Ekonomi Eksklusif/ ZEE)	V	v	-	-	Kemenlu	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemensetneg, Kemenkumham, BIG	APBN
				Perundingan perbatasan maritim RI	-	v	v	v	Kemenlu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM), TNI, Polri, BIG	APBN
				RI dan Filipina (Landas Kontinen/LK)							
				Kesepakatan timeframe perundingan dan penetapan garis batas awal							
				RI dan Vietnam (ZEE) Kesepakatan kelanjutan perundingan	-	v	v	v	Kemenlu	KKP, TNI, Polri, BIG	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				<i>common understanding</i> posisi dasar masing-masing							
				RI dan India (ZEE)	-	v	v	-	Kemenlu	KKP, TNI, BIG	APBN
				Kesepakatan <i>timeframe</i> perundingan dan penetapan garis batas awal							
				RI dan Palau (ZEE)	v	v	v	v	Kemenlu	KKP, TNI, BIG	APBN
				Melanjutkan perundingan							
				RI dan Timor Leste (Laut Teritorial)	-	v	v	v	Kemenlu	Kemenhan, Kemenhub, TNI, Polri, BIG	APBN
				Dimulainya proses pe-rundingan							
				4 dokumen teknis perundingan batas maritim antarnegara yang mutakhir	1	1	1	1	Kemenlu	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim),	APBN
		Pemetaan batas wilayah	Terselenggaranya pemetaan batas wilayah dalam mendukung diplomasi								

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			batas maritim antarnegara							KKP, Kemenhan, Kemenhub, Kemen-ESDM, BIG, TNI, Polri	
			Pengembang-an teknologi dan data penginderaan jauh	Produk penelitian, pengembang-an, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh	v	v	v	v	Lembaga Penerbang-an dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-dikti), KKP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	APBN
				Jumlah kilometer persegi citra satelit resolusi sangat tinggi untuk daerah perbatasan							
2.	Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen sesuai dengan Hukum Internasional	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Survei landas kontinen di luar 200 mil laut	Terpetakannya landas kontinen di luar 200 mil laut	v	v	-	-	BIG	Kemen-ESDM, Kemenlu, TNI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BPPT	APBN
			Penyiapan dokumen	Penyelesaian dokumen	v	v	v	-	Kemenlu	Kemen-ESDM, TNI, BIG	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			submisi	submisi							
			Penyampaian submisi ke PBB	Submisi diterima PBB	-	-	v	-	Kemenlu	Kemen-ESDM, TNI, BIG	APBN
A.2 PENGUATAN DIPLOMASI MARITIM											
1.	Peningkatan Kepemimpin-an di dalam Berbagai Kerja Sama Bidang Kelautan pada Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral	Pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif dengan berdasarkan politik luar negeri bebas aktif	Penyusunan buku putih diplomasi maritim	Terciptanya pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif atas dasar politik luar negeri bebas aktif oleh semua pemangku kebijakan terkait	-	1	-	-	Kemenko Maritim, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko-polhukam), Kemenlu	Kemenhan, KKP, TNI, Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla)	APBN
		Optimalisasi diplomasi ter-kait dengan hukum dan perjanjian	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	International Maritime Organization (IMO)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Kemenlu	APBN
				State Parties on the Law of the Sea (SPLOS)	Delegasi	Delegasi	Unsur pimpin-an Presiden SPLOS	Delegasi	Kemenlu	Kemenko Maritim	APBN
				International	v	v	v	v	Kemenlu	Kemen-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Seabed Authority (ISA)						ESDM, KKP, TNI, LIPI, BIG	
				Indian Ocean Rim Association (IORA)	Ketua	Ketua	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, KKP, Polri	APBN
				ASEAN Maritime Forum	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenhub, KKP, TNI, Polri	APBN
				Brunei Darussalam-Indonesia-Makaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)	v	v	v	v	Kemenlu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-an (Kemenko Perekonomi-an), KKP, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenhub	APBN
				Pelaksanaan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), Kemendagri,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		<i>Inter-governmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO</i>	Terselenggaranya pelatihan internasional: <i>crustacean taxonomy</i> dan <i>ecosystem health</i> , serta kerja sama riset internasional dalam perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas peneliti dan jaringan kerja sama di Kawasan Asia Pasifik	v	v	v	v	LIPI	Kemenko Maritim, KKP, BPPT, Perguruan Tinggi (PT)	APBN dan bantuan luar negeri
		Penyelenggaraan operasi militer selain perang TNI, penegakan hukum, dan penjagaan keamanan laut di wilayah laut yurisdiksi nasional	Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah kedaulatan	Jumlah penyelenggaraan <i>Sail Bahari</i> (paket)	1	1	1	1	TNI	Kemenko-polhukam, Kemenlu, Polri	APBN
		Penyelenggaraan operasi militer selain perang dan	Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di	Mewujudkan laut menjadi terkendali di ketiga Alur Laut	v	v	v	v	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional berupa patroli laut di kawasan Indonesia barat dan timur	wilayah kedaulatan berupa patroli laut di kawasan Indonesia barat dan timur	Kepulauan Indonesia (ALKI), demikian pula semua <i>choke point</i> di sekitar perairan Sabang, perairan Natuna, perairan Sangihe Talaud, perairan Halmahera, perairan laut Arafura						Kemenhub, Kemendagri, Polri	
2.	Peningkatan Peran Aktif dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia di Bidang Kelautan	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Terselenggaranya keamanan maritim di kawasan	Pengamanan Laut Sulawesi yang berada di <i>Tri Border Area</i> antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia	-	v	v	v	Kemenhan	Kemenlu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenkumHAM, TNI, Polri	APBN
				Kerja sama atau latihan bersama antara TNI dengan Angkatan Laut negara kawasan secara bilate-	v	v	v	v	TNI	Kemenko-polhukam, Kemenhan, Kemenlu	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				ral dan regio- nal							
				Kerja sama antara Ba- kamla dengan lembaga ke- amanan laut sipil di negara lain	v	v	v	v	Bakamla	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Polri	APBN
			Keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan	<i>Tripartite Technical Expert Group (TTEG)</i>	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemen-LHK, Polri	APBN
			Terjaganya kepentingan Indonesia dan penegakan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan	Isu Kawasan Laut China Selatan	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenhan, KKP, Kemenhub, TNI, Polri, BIG	APBN
			Peran dan partisipasi aktif Indonesia	<i>ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Maritime Security</i>	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenhan, Kemenkeu, TNI, Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Kerja sama ke- amanan laut	3 negara	3 negara	3 negara	3 negara	Bakamla	Kemenhan, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenkum- HAM, TNI, Polri	
3.	Kepemimpin- an atau Peran Aktif dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan	Optimalisasi diplomasi ter- kait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	Pembentukan instrumen internasional <i>Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	v	v	v	v	Kemenko Maritim, Kemenlu	Kemen- ESDM, Kemen-LHK, KKP, LPI	APBN
			Menggalang dukungan dengan inisiatif kepemimpinan Indonesia dari <i>like minded countries</i>	<i>Terbentuknya Regional Convention Against Illegal, Unreported, and Unregulated, (IUU) Fishing and Its Related Crimes</i>	v	v	-	-	Kemenko Maritim	Kemenlu, KKP, TNI, Polri	APBN
		Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Menjaga sumber daya ikan yang berkelan- jutan	<i>Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing</i>	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kemen-LHK, Polri, LPI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Penetapan RPOA sebagai dasar kebijak-an penangan-an sumber da-ya ikan dan penanggulang-an, pencegah-an, dan pem-berantasan IUU Fishing							
		Pengelolaan sumber daya ikan	Menjaga sum-ber daya ikan yang berkelan-jutan	<i>Regional Fisheries Management Organization (RFMO)</i> Terjaganya kebijakan dan penetapan ketentuan yang berwa-wasan pemba-ngunan berke-lanjutan	v	v	v	v	Kemenlu, KKP	Kemen-LHK, LIPI	APBN
		Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan	Keblanjutan pembangunan sektor perikan-an di Asia Tenggara yang berkesinam-bungan	<i>Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAPDEC)</i>	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kemen-LHK, Kemennstek-dikti, LIPI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di kawasan terjaga							
4.	Peningkatan Penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan	Pencalonan WNI di organisasi internasional kemaritiman	Pencalonan Hakim Mahka-mah Interna-sional untuk Hukum Laut (<i>International Tribunal for the Law of the Sea</i> - ITLOS)	Terpilihnya WNI sebagai Hakim ITLOS	v	v	-	-	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenhub, KKP,Kemen-setneg, Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BIG	APBN
			Perumusan kebijakan penempatan Aparatur Sipil Negara pada organisasi internasional	Penetapan kebijakan dan peraturan	-	v	v	v	Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	Kemenhub, Kemen-ESDM, KKP, Kementerian Ketenaga-kerjaan (Kemnaker), Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, LIPI,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										BPPT	
A.3 PENYELESAIAN TOPONIMI											
1.	Pembakuan Nama Pulau	Pendaya-gunaan pulau-pulau kecil	Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya		500 pulau	550 pulau	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemendagri, BIG, BNPP	APBN
			Validasi dan penamaan pulau-pulau kecil			1.250 pulau	1.250 pulau	1.500 pulau	TNI	Kemenko Maritim, Kemendagri, KKP, BIG, BNPP	APBN
		Pemetaan rupabumi dan toponimi	Survei penaa-nan dan pen-daftaran pulau		-	550 pulau	550 pulau	550 pulau	BIG	Kemenko Maritim, Kemendagri, KKP, BNPP	APBN
		Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi	Kebijakan bidang toponimi dan data wilayah		-	4 rumusan kebijak-an	-	-	Kemendagri	BNPP	APBN
			Verifikasi dan terbakukan nama-nama pulau		-	1.100 pulau	-	-	Kemendagri	BNPP	

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
A.4 PENATAAN RUANG LAUT											
1.	Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antarsektor di Wilayah Laut	Review program kemari- timan nasio- nal	Teridentifikasi- nya program kemaritiman nasional dan berbagai per- masalahan	1 dokumen review kemari- timan	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
		Sinkronisasi program RPJMN	Sinkronnya RPJMN Kemaritiman	1 Perpres	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
		Sinkronisasi renja k/l	Sinkronnya renja k/l	Dokumen renja	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
2.	Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perencanaan Ruang Laut	1 PP	1 PP	-	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen-ATR), Kemenkum-HAM, Kemen-LHK, Kemendagri, Kemen-setneg, Setkab	APBN
			Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang	1 PP	1 PP	-	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Rencana Tata Ruang Laut Nasional Tahun 2016-2036							an, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/ Bappenas), Kemen-ATR, Kemenhub, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemen-setneg, Setkab, TNI, BIG, BNPP	
		Pemetaan tata ruang dan atlas	Terselenggaranya pemetaan tata ruang	8 Dokumen Strategis Percepatan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Pembangunan Wilayah	2	2	2	2	BIG	Kemenko Maritim, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, KKP, Kemenhub, Kementerian Peker-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										jaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUFR), TNI	
		Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	Terlaksananya <i>review</i> kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zona pesisir	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	-	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir	-	-	Kemen-LHK	KKP, TNI	APBN
3.	Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya peraturan daerah tentang RZWP-3-K Provinsi	34 dokumen final/ Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi WP-3-K	8	26	-	-	KKP	Kemendagri, Kemen-ATR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemerintah Daerah (Pemda)	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
4.	Percepatan Penyelesaian Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN), RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan RZ Kawasan Antarwilayah	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya Perpres tentang RZ KSN, KSNT, Teluk, Selat, dan RZ Laut	31 Peraturan Menteri (Permen) KP tentang RZKSNT (Pulau-Pulau Kecil Terluar/PPKT)	5 PPKT	10 PPKT	5 PPKT	11 PPKT	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, Kemenhub, Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
				14 Perpres KSN	1	2	4	7	KKP	Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
				15 Perpres RZ kawasan antarwilayah (Teluk, Selat, dan Laut)	2	2	4	7	KKP	Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
		Perumusan legislasi per-tahanan	Menetapkan wilayah latih-an militer TNI		-	v	v	v	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenhan	APBN
5.	Penyediaan Data Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial	Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai	Terselenggara-nya pemetaan Lingkungan Pantai Indo-nesia (LPI) Skala 1:10K, 1:25K, 1:50K,	144 Nomor Lembar Peta (NLP) peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)	24	40	40	40	BIG, TNI	KKP, Kemen-LHK	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
Tematik Terpadu dalam Kerangka Kebijakan Satu Peta			dan 1:250K								
			Pemutakhiran peta Negara Kesatuan Re-publik Indone-sia termasuk batas Laut Ter-ritorial, Zona Tambahan, Zo-na Ekonomi Eksklusif, dan Landas Konti-nen		v	v	v	v	BIG, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan	APBN
			Terselenggara-nya Pemetaan Lingkungan Laut Nasional (LLN) 1:250K	260 NLP peta LLN	26	78	78	78	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan, KKP, BIG	APBN
			Terselenggara-nya pemuta-khiran peta LPI dan LLN	60 NLP peta LPI termuta-khir	20	0	20	20	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan, KKP, BIG	APBN
			Terselenggara-nya pemetaan garis pantai	9.060 Line Kilometer (LnKm)	1.440	2.540	2.540	2.540	BIG, TNI	Kemenko Maritim, LIPI, LAPAN,	APBN. BUMN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
			Terselenggara-nya pengadaan data batimetri untuk pemeta-an LP	153.600 LnKm data batimetri	38.400	38.400	38.400	38.400	BIG, TNI	LAPAN, BUMN	APBN, BUMN
			Terselenggara-nya pembangun-an pusat data kelautan nasional	1 dokumen basis data kelautan nasional	1	1	1	1	Kemenko Maritim, BIG, TNI	KKP, Kemen-ESDM, BMKG, LIPI, BPPT	APBN
		Pemetaan dan integrasi tematik	Tersedianya peta integrasi tematik laut skala 1:50.000	140 NLP peta integrasi karakteristik laut	35	35	35	35	BIG, TNI	Kemenko Perekonomi-an, KKP, Kemen-PUPR, Kemen-LHK, Kemen-dagri, Pemda	APBN, APBD
				132 NLP peta integrasi eko-sistem pesisir	33	33	33	33	BIG, TNI	Kemenko Perekonomi-an, KKP, Kemen-PUPR, Kemen-LHK, Kemen-dagri, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Tersedianya peta strategis laut skala 1:50.000	80 NLP peta tipologi pesisir	20	20	20	20	BIG, TNI	Kemenko Perekonomi-an, KKP,	APBN, APBD
				20 NLP peta strategis pulau kecil	5	5	5	5	BIG, TNI	Kemen-PUPR, Kemen-LHK, Kemen-dagri, Pemda	APBN, APBD
		Perencanaan ruang laut dan peneliti-an dan pengembang-an (litbang) perikanan	Tersedianya informasi spasial tematik	Peta tematik wilayah laut, terutama: • ekosistem pesisir • daerah tangkapan ikan • penggunaan eksisting ruang laut	8	26	-	-	KKP	Kemenko Maritim, TNI, Polri, BIG	APBN
		Penyeleng-garaan survei pemetaan hidro-oceanografi (surta hidros)	Meningkatnya penyeleng-garaan surta hidros matra laut	Jumlah data peta laut yang dibuat/revisi, meliputi peta kertas dan peta elektronik (<i>Electronic Navigational Charts/ENC</i>)	20 data	20 data	20 data	20 data	TNI	Kemenlu, Kemenhub	APBN
				Jumlah pelak-sanaan survei	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	TNI	Kemenlu, Kemenhub	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
6.	Penyeder-hanaan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Penyeder-hanaan perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Menurunnya waktu peng-urusan per-izinan	Pengalihan pengurusan perizinan dari manual men-jadi <i>online</i>	-	-	-	100%	Kemenhub	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen-kominfo)	APBN
		Perencanaan ruang laut	Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Peraturan Pemerintah	-	1	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen-ATR, Kemen-ESDM, Kemenkum-HAM, Kemensetneg, Setkab	APBN
			Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi Laut	1 Peraturan Pemerintah	-	1	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen-ESDM, Kemenkum-HAM, Kemen-PUPR, Kemen-ATR, Kemensetneg, Setkab, Polri	APBN
7.	Penguatan Pengelolaan Wilayah Daerah	Pendayagu-naan pesisir	Kawasan pesi-sir yang terfa-silitasi penge-lolaannya	16 kawasan	4	4	4	4	KKP	Kemenko Maritim, Kemendagri, Kemenpar,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Aliran Sungai (DAS), Pesisir Laut, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Manajemen Terpadu dan Berkelanjut-an		secara terpadu							Kemen-ESDM, Kemen-LHK, Kemen-PUPR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemda	